

PENGELOLAAN PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BEA BALIK NAMA PERTAMA SEPEDA MOTOR DI UNIT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI SAMSAT AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Eko Sandi Syahputra¹, Reno Affrian², Munawarah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ekosandisy@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada adalah adanya selisih penyetoran PNPB antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNPB di STNK dan Kurangnya Sumber daya manusia dari operator mesin imbinging percetakan TNKB dari pihak ke 3. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama, tujuan dalam pengelolaan TNKB sudah baik. Kedua, proses perencanaan sudah baik. Ketiga, wewenang sudah baik. Keempat, tanggung jawab sudah baik. Kelima, pencapaian tujuan kurang baik. Keenam, sesuai dengan rencana sudah baik. Ketujuh, pencapaian tujuan kurang baik. Kedelapan, SOP sudah baik. Faktor penghambat adalah adanya selisih penyetoran PNPB dan kurangnya pencapaian yang dilakukan. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan aturan, adanya pendaftaran dalam pengelolaan tnkb, adanya wewenang dalam pengelolaan tnkb dan sesuai dengan rencana. Saran diberikan kepada Kepala Kepala Unit Regident agar untuk perlu menekankan lagi kepada petugas pas mengambil ke gudang material TNKB untuk memilih TNKB yang sesuai dengan warna kebutuhan,. Kepada Kepala Urusan Tanda Bagian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar melakukan penambahan pegawai pada unit TNKB supaya dalam pengelolaan TNKB lebih berkualitas dan kuantitas produksi lebih efektif dalam pelaksanaannya. Staf agar lebih memperhatikan selisih penyetoran PNPB antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNPB di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pengelolaan TNKB tersebut berjalan lebih baik.

Kata Kunci: Pengelolaan Penerbitan TNKB, Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The existing problems are the difference in PNPB deposits between STCK registration at BPKB Polda and PNPB at STNK and the lack of human resources from the TNKB printing imbinging machine operator from the 3rd party. The research method used is descriptive and qualitative using data collection techniques: interviews, observations, and documentation. The results of this study. First, the objectives in TNKB management are good. Second, the planning process is good. Third, the authority is good. Fourth, the responsibility is good. Fifth, the achievement of objectives is not good. Sixth, according to the plan is good. Seventh, the achievement of objectives is not good. Eighth, the SOP is good. The inhibiting factors are the difference in PNPB deposits and the lack of achievements made. While the supporting factors are in accordance with the rules, the existence of registration in tnkb management, the existence of authority in tnkb management and in accordance with the plan. Suggestions are given to the Head of the Regident Unit Head to emphasize again to officers when taking to the TNKB material warehouse to choose TNKB that matches the color of the needs. To the Head of Motor Vehicle Registration Section to add employees to the TNKB unit so that the management of TNKB is of better quality and the quantity of production is more effective in its implementation. Staff should pay more attention to the difference in PNPB deposits between STCK registration at the Regional Police BPKB and PNPB at the Samsat STNK because the number of invoices registered by the dealer is not the same as the number of invoices issued so that there is a difference in deposits so that the management of the TNKB runs better.

Keywords: Management of TNKB Issuance, North Hulu Sungai Regency

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran masyarakat serta peningkatan daya saing.

Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (Ranmor) yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. TNKB ini memuat unsur nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) dan masa berlaku yang sesuai dengan masa berlaku STNK.

TNKB ini terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis. Unsur pengaman TNKB ini berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB. Korlantas Polri merupakan instansi yang berhak untuk mengeluarkan TNKB karena TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Jadi, TNKB selain yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Saat ini, ada lima warna dasar TNKB yang berlaku di Indonesia

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Kantor Samsat Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering juga disebut pelat nomor atau nopol adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Samsat. Dibawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 22 Tahun 2009, TNKB beserta

STNK dan juga BPKB, merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan, serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

Unit Registrasi dan Identifikasi adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, dimana tugas dan pokok Unit Registrasi dan Identifikasi adalah melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan baik pendaftaran baru, mutasi keluar maupun mutasi masuk, melaksanakan pelayanan penerbitan BPKB, STNK dan TNKB bagi kendaraan yang telah melalui proses pemeriksaan dokumen, melaksanakan pengecekan ulang ke tempat asal kendaraan di registrasi terhadap kendaraan yang melakukan mutasi masuk sebagai bentuk sistem pengamanan, bekerjasama dengan instansi terkait (dispenda dan jasa raharja) dalam proses pembayaran pajak kendaraan dan asuransi serta sat reskrim pada kasus curanmor dan unit laka lantas dalam hal kasus laka lantas / tabrak lari dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi.

Salah satu tugas pada Unit Registrasi dan Identifikasi adalah mengelola Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau juga sering disebut pelat nomor atau nopol (singkatan dari nomor polisi) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat khususnya pada Kantor Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun permasalahan yang ada pada Kantor Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait masalah TNKB adalah:

1. Masih banyak terdapat warna TNKB yang tidak sesuai dengan warna peruntukan, sehingga dalam proses pembuatan Tanda Nomor Bermotor Kendaraan (TNKB) menjadi kurang efektif dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Adanya selisih penyetoran PNPB antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNPB di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran.
3. Kurangnya Sumber daya manusia dari operator mesin imbosing percetakan TNKB dari pihak ke 3 sehingga berpengaruh di kualitas dan kuantitas produksi Tanda Nomor Bermotor Kendaraan (TBKB), sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaannya yang tidak bisa diperuntukan.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

METODE

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Samsat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl. Muhajirin, Nomor 172 Murung Sari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kode Pos 71471.

Pendekatan penelitian adalah suatu skema tentang cara penelitian akan dilaksanakan. Skema ini dipakai untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian explanatory, yakni penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis yang perlu dibuktikan.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2014:245) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2014:225) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai informan kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2014:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Geroge R. Terry (2021:24-25) Pengelolaan	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Tujuan b. Proses perencanaan
	2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a. Wewenang b. Tanggung Jawab
	3. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	a. Pencapaian Tujuan b. Sesuai dengan Rencana
	4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	a. Pencapaian b. SOP

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan dapat juga diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan sumber-sumber yang ada dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Indikator tujuan dalam pengelolaan TNKB sudah baik dimana tujuan tersebut mengelola nomor kendaraan sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

Indikator proses perencanaan sudah baik dimana proses perencanaan dalam pengelolaan TNKB tersebut dilakukan dengan Bea Balik Nama Pertama pendaftaran baru itu bisa juga didaftarkan ulang untuk pendaftaran yang 5 tahun dan nantinya juga akan membayar dalam PNPB tersebut.

Pengorganisasian adalah proses yang melibatkan pengalokasian dan penggabungan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator wewenang sudah baik yang mana petugas melakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri yang disebutkan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator tujuan dalam pengelolaan TNKB sudah baik dimana tujuan tersebut dari pengelolaan TNKB dimana sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

Pergerakan menjadi fungsi dalam ilmu manajemen yang paling dominan. Karena, fungsi pada organizing dan planning lebih banyak berhadapan langsung dengan mereka yang akan menjalankan rencana yang sudah ditetapkan. Kegiatan pergerakan baru bisa dilakukan bila perencanaan, organisasi dan sumber daya manusia tersedia. Bila fungsi dari pengarahan sudah diterapkan dengan baik, maka manajer akan lebih mudah dalam mengarahkan seluruh anggotanya untuk bisa mencapai tujuan perusahaan.

Indikator pencapaian tujuan kurang baik yang mana adanya selisih penyetoran PNBPN antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNBPN di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pencapaian masih kurang.

Indikator sesuai dengan rencana sudah baik dimana pengelolaan TNKB dimana sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

Pengawasan adalah proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang diawasi berjalan sesuai dengan yang semestinya. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang penting dalam suatu organisasi, karena tanpa pengawasan, mungkin akan terjadi penyelewengan, penyimpangan, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

Indikator pencapaian tujuan kurang baik yang mana adanya selisih penyetoran PNBPN antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNBPN di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pencapaian masih kurang.

Indikator SOP sudah baik yang mana dalam pelaksanaan pengelolaan TNKB dimana dalam pengelolaannya sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang mana setiap kendaraan bermotor wajib di registrasikan, baik bagi kendaraan baru ataupun kendaraan registrasi perubahan identitas kendaraan dan pemilik.

Dalam melakukan sebuah peningkatan pasti mendapatkan suatu hambatan atau kendala. Berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor penghambat adalah adanya selisih penyetoran PNBPN antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNBPN di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pencapaian masih kurang.

Jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pencapaian masih kurang.

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal-hal yang mendukung hasil penelitian tersebut dan juga faktor pendukung dari Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pengelolaan TNKB dimana sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor..

Pengelolaan TNKB tersebut Bea Balik Nama Pertama pendaftaran baru itu bisa juga didaftarkan ulang untuk pendaftaran yang 5 tahun dan nantinya juga akan membayar dalam PNPB tersebut.

petugas melakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri yang disebutkan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan.

Pengelolaan TNKB dimana sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

SIMPULAN

Pengelolaan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Pertama Sepeda Motor di Unit Registrasi dan Identifikasi Samsat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, tujuan dalam pengelolaan TNKB sudah baik dimana tujuan tersebut dari pengelolaan TNKB dimana sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. *Kedua*, proses perencanaan sudah baik dimana proses perencanaan dimana dalam pengelolaan TNKB tersebut Bea Balik Nama Pertama pendaftaran baru itu bisa juga didaftarkan ulang untuk pendaftaran yang 5 tahun dan nantinya juga akan membayar dalam PNPB tersebut. *Ketiga*, wewenang sudah baik yang mana petugas melakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri yang disebutkan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. *Keempat*, tanggung jawab sudah baik dimana pengelolaan TNKB sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang

tercantum di plat nomor. *Kelima*, pencapaian tujuan kurang baik yang mana adanya selisih penyetoran PNPB antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNPB di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pencapaian masih kurang. *Keenam*, sesuai dengan rencana sudah baik dimana TNKB sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. *Ketujuh*, pencapaian tujuan kurang baik yang mana adanya selisih penyetoran PNPB antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNPB di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pencapaian masih kurang. *Kedelapan*, SOP sudah baik yang mana dalam pelaksanaan pengelolaan TNKB dimana dalam pengelolaannya sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang mana setiap kendaraan bermotor wajib di registrasikan, baik bagi kendaraan baru ataupun kendaraan registrasi perubahan identitas kendaraan dan pemilik.

Faktor penghambat adalah adanya selisih penyetoran PNPB dan kurangnya pencapaian yang dilakukan. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan aturan, adanya pendaftaran dalam pengelolaan tnkb, adanya wewenang dalam pengelolaan tnkb dan sesuai dengan rencana.

Saran

Kepada Kepala Kepala Unit Regident agar untuk perlu menekankan lagi kepada petugas pas mengambil ke gudang material TNKB untuk memilih TNKB yang sesuai dengan warna kebutuhan, agar petugas gudang memperhatikan stok warna yang akan diserahkan atau didistribusikan ke setiap wilayah.

Kepada Kepala Urusan Tanda Bagian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar melakukan penambahan pegawai pada unit TNKB supaya dalam pengelolaan TNKB lebih berkualitas dan kuantitas produksi Tanda Nomor Bermotor Kendaraan (TBKB) menjadi lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Staf agar lebih memperhatikan selisih penyetoran PNPB antara pendaftaran STCK di BPKB Polda dan PNPB di STNK Samsat karna jumlah faktur yang didaftarkan dealer tidak sama dengan jumlah faktur yang keluar sehingga terjadi selisih setoran sehingga dalam pengelolaan TNKB tersebut berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

- Chairunnisa, 2020. Pengelolaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Meningkatkan Kinerja Pendapatan Pada Kantor UPT Medan Utara.
- Cici Angraini, 2021. Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- George Terry, 2021. Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi. Bumi Aksara.
- Harbani, Pasolong. 2018. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV. Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara (Revisi Ketiga)
- Kumorotomo. 2016. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunyoto. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Buku Seru
- Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller.(2016). Manajemen Pemasaran edisi 12 Jilid 1 & 2.Jakarta: PT. Indeks
- Gaspersz, Vincent, 2017. “Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas”. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gronroos, C. 2016. Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach. Chishester: Jhon Wiley and Sond, Ltd.
- Pasolong 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyawan, Rahman. 2016. Birokrasi dan Pelayanan Publik. Bandung: Unpad Press.
- Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik, Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2016, Metode Penelitian Kualitatif Bandung : Alfabeta Bandung
- Suwarno, Wiji. 2018. Psikologi Perpustakaan. Jakarta: Sagung Seto.
- Tjiptono Fandy. 2016. Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Yogyakarta. Edisi 1.
- Tim Penyusun, 2023. Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai.